

Bawaslu Utamakan Pencegahan pada Pemilu 2024

DENPASAR (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia meminta jajarannya untuk mengutamakan unsur pencegahan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 di antaranya melalui uji petik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

"Evaluasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) ini merupakan salah satu bagian dari pencegahan yang dilakukan Bawaslu," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Nusa Dua Kabupaten Badung Bali, Kamis (2/6).

Ia menambahkan evaluasi pemutakhiran berkelanjutan bertujuan untuk memastikan validitas data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu ini menekankan prioritas utama Bawaslu sekarang adalah

memperkuat pencegahan.

"Kita harus mengutamakan pencegahan sebagai upaya awal untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan terkait kepemilikan nanti," ucapnya pada acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali.

Selain itu, katanya, harus memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan, bahwa informasi yang tersebar di masyarakat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani

mengatakan, proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sudah berjalan usai Pilkada Serentak 2020. Ariyani mengatakan jajarannya telah melakukan uji petik untuk memverifikasi secara faktual data pemilih berkelanjutan yang telah dihasilkan KPU kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Ariyani didampingi empat komisioner lainnya, yakni I Wayan Widyadana Putra, I Wayan Wirka, I Ketut Rudia, dan I Ketut Sunadra, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha

Selain Lolly dan Komisioner Bawaslu Bali, hadir dalam acara tersebut anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya beserta Ketua dan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. (Ant)-d

Eks

Haryadi hanya mengenakan jaket dan bertopi. Hanya saja, beberapa orang yang mengendarai mobil Avanza nampak sibuk. Dirinya bahkan tidak mengira jika orang-orang tersebut merupakan petugas KPK. Saat KR mencoba menelpon Haryadi, nomornya sudah tidak bisa dihubungi.

Sementara Pj Walikota Yogya Sumadi SH MH, membenarkan ada petugas KPK yang mendatangi kompleks Balaikota Yogya kemarin siang. Sekitar pukul 13.00 WIB saat hendak memimpin rapat, ada tiga orang yang menunjukkan identitas sebagai petugas KPK dan hendak melakukan penyegelan. "Saya lihat identitasnya, benar. Terus mohon izin melakukan penyegelan di ruangan Walikota. Setelah itu ya karena saya kooperatif ya mangga, silakan. Terus saya

tinggal rapat," urainya.

Saat melakukan penyegelan, imbuhan Sumadi, petugas KPK tidak mengenakan seragam. Dirinya juga tidak mengecek ruangan mana saja yang disegel karena lantas melanjutkan rapat hingga sore hari. Akan tetapi, aktivitas KPK selama di kompleks Balaikota Yogya berlangsung selama satu jam. Sumadi pun tidak mengetahui sejumlah aparat sipil negara (ASN) yang turut diamankan. Begitu pula saat ditanya terkait sosok Haryadi Suyuti yang turut diamankan, ia sama sekali tidak mengetahui.

"Saya tidak tahu. Saya pulang itu, saya tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan," tandasnya.

Proses penyegelan serta aktivitas yang dilakukan oleh petugas KPK,

Amankan

ditangkap tersebut. "Tim segera melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak dimaksud. Segera setelahnya akan kami sampaikan perkembangan," ucap Ali.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap itu.

Wakil Ketua KPK Nurul

Ghufron mengatakan, petugas KPK turut mengamankan sejumlah uang dalam pecahan dolar AS dan dokumen terkait operasi tangkap tangan (OTT) mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti dan kawan-kawan.

"Kami mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan beberapa orang. Sementara jumlah uang da-

hingga tadi malam masih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Namun, setidaknya terdapat tiga ruang di Balaikota yang dilakukan penyegelan.

Selain salah satu ruang kerja Walikota, ruangan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta ruang di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, mengaku dirinya mendapat laporan tiga ruang di Balaikota yang disegel oleh KPK. Akan tetapi ia tidak mengetahui secara persis berapa orang dan siapa saja yang turut diamankan.

"Terkait apa saya juga tidak tahu. Tetapi laporan yang saya terima seperti itu," katanya.

(Dhi)-f

Yogya

akhirnya hanya digunakan untuk rekreasi, hobi atau berolahraga. Peningkatan warga bersepeda pada masa pandemi juga antara lain lebih didasarkan pada motif itu. Meskipun begitu, gejala 'gaya hidup' itu dapat menjadi momen yang baik untuk memikirkan kembali kota bersepeda. Menemukan cara agar perubahan itu tetap ada dan berkembang menjadi budaya bersepeda arus utama di masa pascapandemi.

Sebetulnya usaha untuk menghidupkan kembali Yogya sebagai kota sepeda sudah banyak diupayakan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, dan komunitas pesepeda. Tahun 2008 Pemkot Yogya menginisiasi gerakan 'Sego Segawe' (sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe) untuk mengajak warga menggunakan sepeda ke sekolah dan tempat kerja. Penyelenggaraan acara bersepeda massal dengan tema Fun Bike

pernah sangat marak di kota ini, dan masih sering diadakan sampai sekarang. Selain itu, usaha untuk membuat jalan yang lebih ramah bagi pengendara sepeda juga sudah dilakukan, yaitu dengan membuat penanda di jalan untuk memberikan jalur khusus bagi pesepeda.

Mempromosikan bersepeda sebagai bermanfaat seperti menjadi tugas yang mudah karena ini baik untuk lingkungan dan kesehatan. Meskipun ada beberapa jenis kampanye bersepeda yang dapat kita pelajari dan dapatkan inspirasinya. Pertanyaan dasarnya adalah apa yang dapat lebih meyakinkan orang untuk akhirnya memilih sepeda sebagai alat transportasi utamanya sehari-hari?

Hal pertama yang perlu disadari dari 'kekurang-berhasilan' kampanye untuk menjadikan sepeda sebagai bagian integral dari mobilitas masyarakat adalah bahwa motivasi

intrinsic saja tidak cukup. Dibutuhkan persepsi dan pengalaman positif dengan bersepeda sebelum mereka secara serius mempertimbangkan untuk mengubah pola penggunaan moda transportasinya.

Kampanye untuk membangun budaya bersepeda akan kurang efektif tanpa dibarengi oleh dorongan dari luar. Seperti keberadaan infrastruktur, kebijakan ekonomi-politik, struktur sosial lalu lintas yang dapat memberikan 'jaminan' keadilan dan keamanan bagi pesepeda. Infrastruktur mungkin yang tidak sulit untuk diwujudkan. Mengubah kebijakan pembangunan kota yang selama ini lebih berorientasi atau memfasilitasi kendaraan bermotor nampaknya jauh lebih sulit, mengingat kepentingan kapital di belakangnya.

Sedangkan struktur sosial lalu lintas yang berkeadilan diperlukan supaya tidak terjadi eksklusivitas, tapi

memberikan pemerataan akses dan proteksi pada pesepeda. Ini dapat terjadi dengan membangun pola relasi di jalan yang didasarkan pada sikap toleran, rasa hormat dan saling menghargai. Dengan demikian, yang tidak kalah penting adalah mengampanyekan kepada pengguna kendaraan bermotor untuk mengembangkan sikap dan perilaku berlalu-lintas yang beradab.

Lepas dari kesulitannya, menjadi imperatif bagi Yogya yang sudah mencanangkan dirinya sebagai 'Kota Toleran', untuk terus berusaha membangun motivasi ekstrinsik bagi pesepeda. Kota yang ramah terhadap pesepeda mencerminkan toleransi dan inklusi sosial. Yogya akan semakin istimewa dengan mengembalikan pamornya sebagai 'kota sepeda'.

(Penulis adalah Dosen Prodi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-d

MENTERI ATR: Bank Tanah Butuh Rp 2,5 Triliun

JAKARTA (KR) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kebutuhan anggaran Bank Tanah sebesar Rp 2,5 triliun, sementara modal awal yang sudah ada Rp 1 triliun.

"Sudah mendapatkan modal awal Rp 1 triliun. Mudah-mudahan dapat lagi Rp 1,5 triliun pada tahun anggaran ini," kata Sofyan Djalil dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Menteri ATR menjelaskan, Bank Tanah merupakan badan baru yang berdiri 1 Januari 2022. Operasional Bank Tanah dalam rangka upaya mendukung jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemer-

taan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

"Namun, karena kondisi APBN yang sulit, mudah-mudahan komitmen Pemerintah tetap jalan, dengan demikian Bank Tanah bisa efektif dan kami bisa segera merekrut dewan pengawas perwakilan masyarakat, yang nantinya mendapatkan persetujuan DPR," harapnya.

Menurut Sofyan Djalil, pagu anggaran Kementerian ATR tahun 2022 sebesar Rp 8,3 triliun. Anggaran itu mengalami dua kali penyesuaian yakni Rp 270 miliar dan Rp 263 miliar. "Sampai saat ini, capaian program dengan serapan anggaran sebesar Rp 2,06 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran," jelasnya.

Sementara, pagu anggaran yang diberikan tahun 2023 sebesar Rp 7,49 triliun atau jauh lebih rendah daripada pagu 2022. (Ant)-f

Otak

wilayah Jateng dan DIY. Rencananya, hasil kredit Bank Jogja ini untuk gali lubang tutup lubang," paparnya.

Sebelumnya, PT Transvision melakukan kerja sama dengan Bank Jogja untuk kredit karyawan. Selama kurun waktu Agustus 2019 hingga Juli 2020, Bank Jogja telah mengucurkan dana Rp 29,855 miliar untuk 168 kredit karyawan. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 6 karya atas nama karyawan PT Transvision dan 162 karyawan fiktif.

"Dari total dana yang cair, kredit fiktifnya Rp 28,355 miliar. Kemudian sempat ada angsuran senilai Rp 1,5 miliar se-

belum kredit macet, sehingga kerugian negara sekitar Rp 27,4 miliar," terangnya.

Dari hasil pencairan kredit tersebut mengalir ke tersangka TS. Kemudian tersangka TS menyamakan uang tersebut untuk membeli aset-aset kendaraan seolah-olah menjalankan bisnis transportasi dan menjalankan bisnis lainnya. Sedangkan tersangka AK dipercaya TS untuk mengelola bisnis tersebut.

"Tersangka AK ini merupakan tangan kanan dari TS. Kemudian AK dipercaya menjalankan bisnisnya dari hasil pencairan kredit. Untuk aset-asetnya juga sedang kami telusuri," katanya. (Sni)-f

Tangani

PMK. Pelarangan dilakukan di level kabupaten yang dinyatakan sebagai zona merah dan hitam atau wilayah dengan risiko penularan PMK tinggi. Tindakan itu dilakukan supaya penularan tidak semakin meluas.

Walaupun begitu untuk daerah yang dinilai aman diizinkan melakukan distribusi hewan ternak dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan ma-

asyarakat. Terlebih saat ini mendekati Hari Raya Idul Adha.

"Memang di Jawa Timur banyak ternak yang terjangkit PMK, tapi kan tidak semua kabupaten kena. Kalau dari kabupaten yang bebas disertai dengan persyaratan dan bukti surat sehat yang menyatakan hewan itu aman masih memungkinkan masuk," tandasnya. (Ria)-d

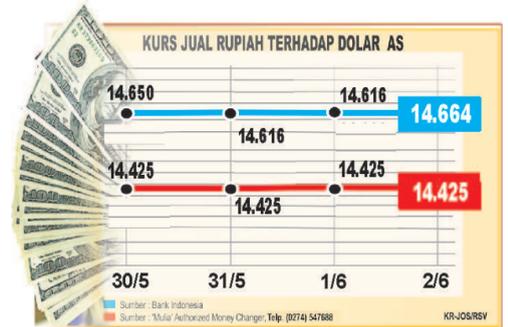
95,7% Calhaj

Ia mengatakan, bagi calon jemaah haji yang hasil tes PCR-nya belum keluar dari 72 jam, tidak akan diberangkatkan. "Untuk itu harus kita perhitungkan, terutama oleh petugas dalam menyampaikannya terkait dengan waktu pemeriksaan PCR," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa semua syarat perjalanan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi pada tahun 1443 H/2022 M harus dipenuhi sebelum pemberangkatan jemaah haji ke

Tanah Suci Mekkah dan Madinah. "Saya ingin ingatkan kepada Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, bahwa syarat perjalanan haji yang sudah ditentukan Arab Saudi harus dipenuhi, pertama syarat vaksin," katanya.

Menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, jemaah haji harus sudah mendapat vaksinasi Covid-19 dan memiliki hasil pemeriksaan PCR negatif yang sampelnya diambil 72 jam sebelum keberangkatan. (Ant/San)-d



Prakiraan Cuaca						Jumat, 3 Juni 2022	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-32	60-95	
Steman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95	
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-32	65-95	
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-32	65-95	
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-32	65-95	

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir

Fenomena Booming Bank Digital



Anik Sri Widawati, SSos MM
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

Pesatnya perkembangan teknologi digital ternyata bisa membawa perubahan yang sangat besar terhadap sektor keuangan, termasuk perbankan. Digitalisasi mengarahkan industri ini pada proses transformasi digital melalui bank digital atau Neo bank. Sehingga tidak mengherankan apabila

di masa pandemi saat ini, perkembangan bank digital menjadi sangat fenomenal.

Bank Digital ??

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/PJOK.03/2021 bahwa bank digital adalah layanan perbankan elektronik untuk mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah sebagai upaya untuk memberikan layanan secara cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat dilakukan secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.

Merujuk pada pengertian diatas, maka seluruh layanan pada bank digital dilakukan secara online, tanpa layanan kantor cabang dan tanpa ATM juga. Salah satu keuntungan dari bank digital adalah kemudahan dalam mengakses layanannya, dimana

nasabah dapat melakukan aktivitas kapan saja dan dimana saja tanpa harus mengantri.

Kehadiran dari bank digital juga sebagai respon akan perubahan gaya hidup masyarakat. Dimana selama ini kalau mau buka rekening harus datang, isi form, dan ngantri di kantor cabang bank. Namun sekarang, buka rekening bisa dilakukan sambil rebahan karena semua sudah dipangkas melalui digitalisasi.

Sehingga keunggulan yang ditawarkan oleh bank digital, antara lain: 1) Praktis, dimana nasabah tidak perlu harus ke bank atau ATM dan nasabah dapat menggunakan layanan darimana pun selama 24 jam; 2) Mudah dijangkau di daerah terpencil selama terkoneksi dengan akses internet.

Sementara itu, jika dilihat dari

sisi penyelenggara bahwa proses operasional bank digital juga menguntungkan karena tidak perlu membeli atau menyewa kantor beserta biaya lainnya seperti listrik, air, gaji, dan sebagainya.

Saat ini kompetisi bank digital semakin banyak pemain baru. Berdasarkan data dari OJK bahwa data bank digital baik yang tengah dalam proses go digital dan yang sudah mengklaim sebagai bank digital yaitu Bank BCA Digital, BRI Agroniaga, Bank Neo Commerce, Bank Capital, Bank Harda Internasional, Bank QNB Indonesia, KEB HanaBank, Jenius dari Bank BTPN, Wokee dari Bank Bukopin, Digibank dari Bank DBS, TMRW Bank UOB, Jago dari Bank Jago, Motion Banking dari MNC Bank, Bank Aladin, dan Allo Bank.

Siapa yang dibidik oleh bank

digital??

Menurut Jahja Setiaatmadja, kalau bank konvensional memang melayani seluruh nasabah dari berbagai segmen dan usia. Sementara target pasar yang dibidik oleh bank digital adalah pasar tertentu atau disebut niche market yaitu generasi milenial dan generasi Z yang lebih melek dan terbiasa dengan dunia digital. Generasi tersebut membutuhkan layanan khusus yang bisa diberikan oleh bank digital.

Keamanan data nasabah ??

Disamping kemudahan akses dan layanan ada hal yang harus menjadi perhatian serius dari bank digital adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan keamanan transaksi. Jangan sampai data nasabah dimanfaatkan pihak-pihak



yang tidak bertanggungjawab.

Yang terpenting yang harus di jaga dari bank digital adalah proteksi data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan data nasabah. Kemajuan teknologi membuat berbagai transaksi dan penyimpanan data dilakukan dalam jaringan internet sehingga cyber risk menjadi risiko sangat penting untuk selalu dimonitor dan dicegah agar tidak terjadi, serta harus diketahui bagaimana upaya pemulihannya. OJK dan BI merupakan dua regulator dalam mengatur standar keamanan sistem informasi, tata kelola dan manajemen risiko dalam pelayanan perbankan digital.

Selamat datang era baru, era ekonomi digital. ***